



**PKM PENGEMBANGAN LAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK
PADA KPU KOTA BUKITTINGGI**

Al Rafni¹, Suryanef²

¹Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

²Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

Email: [1alrafni@fis.unp.ac.id](mailto:alrafni@fis.unp.ac.id), [2suryanef@fis.unp.ac.id](mailto:suryanef@fis.unp.ac.id)

ABSTRAK

Sebagai salah satu program prioritas nasional, Rumah Pintar Pemilu (RPP) didirikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari seluruh tingkatan baik KPU Nasional, KPU Provinsi, maupun kabupaten/kota. Tujuan kehadiran RPP sebagai pusat pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah pengabdian lakukan ternyata pemanfaatan RPP sebagai pusat sumber belajar politik belum dilakukan secara optimal. Permasalahannya terletak pada : (1) belum efektifnya pemanfaatan pusat layanan yang ada pada RPP ; (2) belum tersedianya *guide* (fasilitator) yang menjadi pemandu pada RPP ; dan (3) belum tersedianya sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal. Dengan diadakannya Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini diharapkan pengembangan layanan RPP sebagai sarana pendidikan politik masyarakat dapat dioptimalkan oleh KPU Kota Bukittinggi. Demikian juga diharapkan menjadi model bagi RPP yang ada di kabupaten/kota lainnya.

Kata kunci: Rumah Pintar Pemilu, Pendidikan Politik, Kearifan Lokal, Pemilu.

ABSTRACT

As one of the national priority programs, the Election Smart House (RPP) was established by the General Election Commission (KPU) from all levels, both the National KPU, Provincial KPU, and district / city. The purpose of the presence of the RPP as a center for learning democracy for the community. Based on the results of research that have served, it turns out that the use of RPP as a center for political learning resources has not been done optimally. The problem lies in: (1) ineffective use of existing service centers in the RPP; (2) the unavailability of guides (facilitators) who become guides in the lesson plans; and (3) the unavailability of learning resources for political education based on local wisdom. With the holding of the Community Partnership Program (PKM), it is expected that the development of RPP services as a means of community political education can be optimized by the KPU of Bukittinggi City. It is also expected to become a model for RPP in other districts / cities.

Keyword: Election Smart House, Political Education, Local Wisdom, Elections

PENDAHULUAN

RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas proyek edukasi masyarakat. Bappenas menargetkan KPU di seluruh Indonesia pada tahun 2019 memiliki RPP sebagai pusat pendidikan pemilih. Sebagai program strategis nasional, pembentukan RPP diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kepemiluan dan kehidupan berdemokrasi sehingga terjadi proses pendidikan politik yang berkelanjutan. Dalam pedoman penyelenggaraan RPP dijelaskan bahwa tujuan umum RPP adalah : (1) meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas ; dan (2) menjadi pusat informasi kepemiluan. Sementara tujuan khusus adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara meningkatkan pemahaman esensi dan urgensi demokrasi serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

RPP dioperasionalkan berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU No.220/KPU/2016 perihal fasilitasi pendidikan pemilih dan SE KPU No.339/KPU/VI/2016 tentang Pengendalian Program Pembentukan RPP. Berdasarkan SE tersebut peraturan tentang pelaksanaan RPP dijalankan. Begitu pentingnya peran RPP sebagai sumber belajar pemilu dan demokrasi seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Namun fakta mengungkapkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan layanan RPP pada KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota secara optimal. Hal ini dibuktikan oleh daftar kunjungan selama lebih kurang dua tahun beroperasi. Belajar dari penelitian-penelitian di negara maju yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk terus menerus membuat ukuran-ukuran keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik yang baik

melalui sumber belajar yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Penelitian di Australia dengan program *indigenous electoral participation* yang merupakan kerjasama terus menerus dari KPU setempat dengan masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi (Setiawaty, 2014). Demikian juga dengan penelitian David E. Campbell dan Richard G. Niemi (2016), mereka telah melakukan riset terhadap masyarakat warganegara usia 18-24 tahun selama kurun waktu 2006-2010 untuk mengevaluasi secara terus menerus tingkat pengetahuan politik masyarakat usia muda melalui *National Assesment of Educational Progress (NAEP)*.

Pendirian RPP sebagai sarana pendidikan politik menjadi penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekaligus untuk berpartisipasi dalam pemilu. Data empiris menunjukkan kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada pemilu nasional misalnya, pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (75,11%). Pada level daerah fenomena yang sama juga terjadi. Di Sumbar misalnya untuk kasus Kota Padang, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2004 (70%), pemilu presiden menurun menjadi 64%, bahkan pemilu kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2005 dengan partisipasi pemilih hanya 52%. Sementara itu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang baru dilaksanakan 2018, partisipasi pemilih hanya mencapai 64,05%. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik, namun pemanfaatan RPP sebagai pusat sumber belajar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman politik dan sekaligus partisipasi politik.

Mitra PKM mengalami permasalahan berikut ini : (1) belum efektifnya pemanfaatan pusat layanan yang ada pada RPP ; (2) belum tersedianya *guide* (fasilitator) yang menjadi pemandu pada RPP ; dan (3) belum tersedianya

sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal. Untuk itu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk PKM ini agar pemanfaatan RPP sebagai sarana pendidikan politik dapat diaktualisasikan dengan baik sehingga diharapkan berpengaruh kepada kemelekwacanaan politik masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah : (1) merancang buku pedoman pemanfaatan RPP yang aplikabel untuk mengefektifkan pemanfaatan pusat layanan yang ada pada RPP ; (2) melakukan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan bagi fasilitator yang bertugas sebagai *guide* (fasilitator) pada RPP ; dan (3) mendesain sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, dimulai dengan kesepakatan waktu dan tempat kegiatan, pengambilan data umum, persiapan teknis dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
2. Persiapan materi pelatihan dan penyuluhan oleh para instruktur.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan buku pedoman.
4. Pelaksanaan kegiatan PKM.
5. Pendampingan dan penyempurnaan hasil/produk kegiatan PKM.
6. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan PKM.

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan PKM ini dapat dilihat pada matrik berikut:

No	Permasalahan Mitra	Solusi	Output Kegiatan
1	Belum efektifnya pemanfaatan pusat layanan RPP.	Merancang buku pedoman pemanfaatan RPP yang	Tersedia nya buku pedoman pemanfaatan pusat

		aplikabel untuk mengefektifkan pemanfaatan pusat layanan RPP.	layanan RPP.
2	Belum tersedianya <i>guide</i> (fasilitator) yang menjadi pemandu pada RPP	Melakukan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan bagi fasilitator yang akan bertugas sebagai <i>guide</i> (fasilitator) pada RPP.	Tersedia nya 30 orang fasilitator yang telah dilatih untuk menjadi <i>guide</i> (fasilitator) pada RPP.
3	Belum adanya sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal.	Mendesain sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal.	Tersedia nya sumber belajar pendidikan politik berbasis kearifan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada RPP yang ada pada KPU Kota Bukittinggi. Pada tahap awal dilakukan kesepakatan dari pihak KPU untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, FGD, dan pelatihan. Acara dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Bukittinggi, relawan demokrasi yang direkrut oleh KPU Kota Bukittinggi sejumlah 30 orang, serta Staf Bagian hubungan Masyarakat dan Sosialisasi KPU Kota Bukittinggi. Kegiatan dilakukan selama dua hari penuh dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Pada ***sesi pertama pada hari pertama*** disampaikan materi ***Pengelolaan dan Program Edukasi Pada Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat.*** Pengelolaan pada RPP menjadi penting agar program-program edukasi yang ada dapat

dimanfaatkan masyarakat pengguna secara optimal.

Kehadiran RPP saat ini sebagai sebuah inovasi dalam pendidikan politik dapat dimanfaatkan sebagai pusat sumber belajar politik. Oleh karena itu RPP harus dapat dikelola dengan baik terutama dalam membantu semua orang untuk belajar sekaligus menampilkan kompetensinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Januszewski dan Molenda (2017), bahwa hakekat pusat sumber belajar adalah :

“A place – which can be anything from part of a room to a complex of building – that is set up specially for the purpose of housing, and making available for use, a collection of learning materials in different media, or for providing facilities for the production as same.”

Sumber belajar mencakup data, orang, dan benda yang dapat digunakan untuk belajar demi tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Tentunya dalam hal RPP sebagai sumber belajar berhubungan dengan proses pendidikan politik, dan nilai-nilai demokrasi. Pada hakekatnya sumber belajar dapat dikembangkan dengan mengambil bentuk *by design* dan *by utilization*. Tujuan pengembangannya untuk *facilitate learning and improving performance*. Menurut Mudhofir dalam Rafni dan Suryanef (2018) pengembangan sebuah pusat sumber belajar melalui tahapan berikut: (1) analisis kebutuhan; (2) mengembangkan sarana fisik; dan (3) mengembangkan program-program. Sedangkan prinsip-prinsip pegelolaannya berpijak pada empat hal yaitu: (1) prinsip pengelolaan pusat informasi, yang ditujukan untuk siapa, bagaimana, dan apa konten informasi yang dibuat; (2) prinsip pengelolaan layanan, sangat tergantung pada kualitas aktifitas dan petugas layanan; (3) prinsip pengelolaan pengembangan instruksional sangat tergantung pada kemampuan membuat *need assessment*, memilih sumber belajar, mengevaluasi, dan

mengembangkan program instruksional; dan (4) prinsip pengelolaan produksi yang berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional. Sementara itu mengenai program-program edukasi telah dilakukan FGD untuk menentukan kemungkinan dikembangkan program-program edukasi oleh RPP KPU Kota Bukittinggi untuk pra pemilih, pemilih pemula, pemilih perempuan, dan masyarakat umum.



Gambar 1: Al Rafni mengelaborasi materi pelatihan bersama peserta.

Sesi kedua pada hari pertama, disampaikan materi **Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik**. Mengapa perlu pendidikan politik melalui RPP? Jawabannya adalah : (1) jumlah pemilih salah satu indicator penting partisipasi pemilu ; (2) tingginya jumlah suara pemilih adalah tanda vitalitas demokrasi ; (3) menurut *International IDEA, voters turn out trends round the world*, tren secara global mengalami penurunan signifikan sejak 1990-an ; dan (4) Indonesia juga mengalami tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu masih rendah.

Kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu ditunjukkan oleh data berikut ini:

Sumber: Sulisty (2019).

No.	Iven Pemilu	% Partisipasi
1	Pemilu 1955	91,4
2	Pemilu 1971	96,6
3	Pemilu 1977	95,5

4	Pemilu 1982	95,5
5	Pemilu 1987	96,4
6	Pemilu 1992	95,1
7	Pemilu 1997	93,6
8	Pemilu 1999	92,6
9	Pemilu 2004	84,1
10	Pemilu 2009	70,9
11	Pemilu 2014	72
12	Pemilu 2019	81

Sesi ketiga pada hari pertama, juga diberikan materi tentang **Bagaimana Mengelola Keuangan RPP** agar dapat menjadi sumber belajar masyarakat. Efektifitas pusat sumber belajar sangat tergantung pada ketersediaan dana seperti bagaimana mengembangkan program-program instruksional, memilih sumber belajar seperti menyediakan weblog. Hal ini sejalan dengan penelitian Sanchez, dkk. (2017) bahwa melalui weblog tersedia sarana untuk memberikan informasi dan pengaruh pada arena politik termasuk memberikan kritik dan atau masukan pada suatu persoalan.



Gambar 2: Tim Pelaksana PKM, Komisioner KPU Kota Bukittinggi bersama peserta penyuluhan dan pelatihan.

Sesi keempat pada hari pertama, disampaikan materi tentang **Pembelajaran Politik Berbasis Kearifan Lokal**. Menurut Radmila (2011) kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota

masyarakatnya. Istilah kearifan lokal berasal dari *local genius* yang diperkenalkan oleh Quaritch Wales (1948-1949) dengan arti “kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.” Kearifan lokal adalah tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal (*indigenous people*). Fungsi kearifan lokal menurut Sartini (2006) diantaranya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan sumberdaya manusia dan juga bermakna politik seperti upacara ngakuk merana dan kekuasaan *patron-client*. Salah satu contoh pembelajaran politik berbasis kearifan lokal adalah yang dilakukan Negara Australia dalam program *indigenous electoral participation* yang merupakan sarana kerjasama terus menerus dari KPU dengan masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan demokrasi yang baik.

Adapun model pembelajaran berbasis budaya dengan menggunakan kearifan lokal terdiri dari : (1) model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah ; (2) model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita-cerita rakyat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat ; dan (3) model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional (Sutarno, 2008). Menumbuh-kembangkan berbagai jenis kearifan lokal dari masing-masing suku bangsa perlu dilakukan. Penelitian The Habibie Centre (2007-2009) tentang model demokrasi lokal di empat daerah termasuk daerah Sumbar menjelaskan temuannya bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti egaliter, musyawarah dan mufakat sangat berkontribusi membangun demokrasi lokal. Nilai-nilai lokal yang dulunya dominan dalam budaya Minang perlahan tercerabut dan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan dan praktek-praktek luhur dari nenek moyang mulai ditinggalkan masyarakatnya.

Pada sesi ini dielaborasi materi-materi pembelajaran politik yang kental dengan adat

dan budaya Minang seperti bagaimana menjadi pemimpin yang egaliter, bagaimana demokrasi bersanding dengan adat, termasuk juga pepatah-petitih atau pantun-pantun adat yang sudah lama ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada hari kedua difokuskan pada kegiatan untuk melatih relawan demokrasi menjadi *guide* (fasilitator) pendidikan politik pada RPP. **Sesi pertama** disampaikan tentang **Pemilu dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Negara Demokrasi**. Materi ini dijadikan *basic* bagi terbangunnya wawasan yang sama bagi relawan demokrasi yang akan menjadi *guide* (fasilitator) pada RPP tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. **Materi kedua** tentang **Bagaimana Menjadi Fasilitator yang Baik**. Terdapat dua variable yang mempengaruhi keberhasilan seorang fasilitator yaitu sikap dan perilaku serta kemampuan akademik. Sikap dan perilaku menyangkut kedisiplinan, integritas, kerjasama dan prakarsa. Sementara kompetensi akademik menyangkut penguasaan materi ajar, kemampuan komunikasi dan presentasi serta penguasaan strategi pembelajaran.

Pelatihan untuk fasilitator ini dilaksanakan satu hari penuh agar nantinya 30 orang relawan demokrasi yang dilatih dapat ditempatkan sebagai *guide* (fasilitator) pada RPP KPU Kota Bukittinggi. Pelatihan juga mendemonstrasikan alat peraga berbasis permainan ular tangga wisata pemilu. Adapun konten dan *background* gambar dari ular tangga wisata pemilu diambil dari pepatah-petitih yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sementara latar gambarnya menyajikan daerah-daerah wisata yang ada di Sumatera Barat. Dengan permainan ular tangga wisata pemilu kita dapat belajar pemilu dengan mengenailnilai-nilai kearifan lokal sekaligus memperkenalkan keelokan alam Sumatera Barat.



Gambar 3: Suryanef bersama dua orang Komisioner KPU Kota Bukittinggi mengelaborasi materi pelatihan Bersama relawan demokrasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan layanan RPP sebagai sarana pendidikan politik berbasis kearifan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan layanan dilakukan dengan tiga hal yaitu: **Pertama**, melakukan FGD dengan Komisioner KPU Kota Bukittinggi dan staf serta *stakeholder* terkait untuk merumuskan bentuk pengelolaan RPP sehingga terdapat standar operasional yang jelas. **Kedua**, dilakukan pelatihan pada relawan demokrasi agar dapat menjadi *guide* (fasilitator) pada RPP. Pelatihan meliputi wawasan *basic* tentang kepemiluan, partisipasi dan demokrasi. Disamping itu juga keterampilan personal dan keterampilan akademik. **Ketiga**, pengembangan layanan RPP berbasis kearifan lokal hendaknya menjadi ciri khas bagi pusat layanan pendidikan politik RPP KPU Kota Bukittinggi sehingga dapat dibedakan dengan pusat layanan RPP lainnya yang ada di berbagai kabupaten/kota.

Mengacu pada rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut baik pada mitra maupun Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal tersebut adalah: (1) KPU Kota Bukittinggi sebaiknya berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk



mengkonstruksikan bahan ajar pendidikan politik yang sarat dengan kearifan lokal. Tujuannya untuk dapat “membangkitkan” pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek terkait dengan kepemiluan dan demokrasi ; (2) relawan demokrasi perlu mendapatkan pembekalan yang lebih intensif untuk memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi *guide* (fasilitator) pendidikan politik pada RPP ; dan (3) Pemerintah Kota Bukittinggi hendaknya memberikan dukungan pada upaya KPU Kota Bukittinggi untuk menjadikan RPP menjadi salah satu objek wisata politik, khususnya dalam hal kepemiluan dan demokrasi. Hal ini bisa menjadi kelengkapan wisata alam Kota Bukittinggi yang selama ini telah dikenali secara luas, baik dalam maupun luar negeri.

DAFTAR REFERENSI

- Campbell, David E. & Richard G. Niemi. (2016). “Testing Civics : State-Level Civic Education Requirements and Political Knowledge” dalam *American Political Science Review* Vol.110 No.3, August 2016.
- Januszewski, A. dan Molenda, M. (2008). *Educational Technology : A Definition with Commentary*. New York : Lawrence Erlbaum Associates.
- Radmila, Sasmita. (2011). *Kearifan Lokal : Benteng Kerukunan*. Jakarta : Gading Inti Prima.
- Rafni, Al dan Suryanef. (2018). *Model Pengembangan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi di KPU Kota Bukittinggi dan KPU Provinsi Sumatera Barat)*. Laporan Penelitian – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang.
- Sanchez-Villar, E. Bigne, J. Aldas-Manzano. (2017). “Blog Influence and Political Activism : An Emerging and Integrative Model”. *Spanish Journal of Marketing=ESIC* (2017, 1-15), <http://dxdoi.org.sjme.2017>.
- Sartini. (2006). “Menggali Kearifan Lokal Nusantara : Sebuah Kajian Filsafati” dalam <http://filsafat.ugm.ac.id> diakses tanggal 14 Juni 2017.
- Setiawaty, Diah. (2014). “Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Pragmatik “ dalam *Jurnal Islamic Review III* (1), April 2014.
- Sulistyo, Eko. (2019). *Konservatisme Politik Anti Jokowi*. Jakarta : Moka Media.
- Sutarno. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Ketenagaan. Departemen Pendidikan Nasional.